

PROFESIONALISME DAN REFORMASI BIROKRASI

Badan Anggaran DPR di penghujung tahun ini akhirnya menyetujui usulan remunerasi bagi 19 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 dari 25 Kementerian/Lembaga yang mengajukan usulan remunerasi. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para PNS yang ada di ke-19 Kementerian/lembaga yang telah disetujui, termasuk juga PNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Program reformasi birokrasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi di jajaran negeri dengan memberikan kompensasi

atas kinerja memang membutuhkan proses yang panjang. Termasuk LAN yang harus mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi.



Sekedar mereview, secara garis besar, proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil Penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil rapat Komite Pengarah Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan akhirnya menyepakati diberikannya tambahan penghasilan mengingat proses reformasi internal yang sudah dilakukan oleh ke-19 kementerian/lembaga. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, remunerasi yang dibayarkan mulai berlaku per 1 Januari 2012 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp. 2,97 triliun. Dari jumlah itu, anggaran yang telah ada diambilkan dari realokasi anggaran yang berasal dari dana optimalisasi sebesar Rp. 108,32 miliar. Sehingga masih ada kekurangan dana sebesar Rp. 2,8 triliun yang dialokasikan dari anggaran BA 99 (anggaran lain-lain).

Hal yang menarik dari program reformasi birokrasi sebenarnya bukan dalam konteks pemberian tunjangan yang mengiringi program tersebut. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kinerja, profesionalisme dan ketaatan

Kementerian/Lembaga terhadap upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Profesionalisme dan ketaatan itu tidak hanya dalam bidang administrasi, tapi esensi reformasi birokrasi adalah minimnya kemampuan untuk memanipulasi alokasi anggaran keuangan dengan bersembunyi di balik laporan administratif, berjalannya semua program dengan baik, komunikasi dan semua hal yang berkaitan dengan publik berjalan dengan baik, penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif, penerapan *reward* and *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan, serta hasil pembangunan nyata (pro pertumbuhan, pro lapangan kerja, dan pro pengurangan kemiskinan). Agar lebih efektif dalam upaya penciptaan *good governance*, pemerintah pun menerapkan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) *online* yang mulai direalisasikan tahun 2012 ini.

Selain penilaian secara kelembagaan, program reformasi birokrasi juga akan menerapkan pola yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan, yakni sistem *balance score card* untuk menilai kinerja individu. Penilaian kinerja individu ini kedepannya akan menjadi dasar untuk memberikan perhitungan besaran tunjangan remunerasi yang akan diterima pegawai. Artinya, kompetensi, prestasi dan kapasitas personal setiap pegawai akan menjadi tolok ukur dalam pemberian remunerasi. Jika tidak mampu menunjukkan kinerja yang produktif, maka pegawai yang bersangkutan akan mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Cukup fair jika sistem ini berjalan secara adil, tidak subjektif dan tidak dilandasi *like and dislike*. Nah, siapkah anda dengan program reformasi birokrasi yang dijalankan? (Budi Prayitno) Sumber gambar (<http://3.bp.blogspot.com/sCs4ZvQRbn4/TxdaCAwGTEI/AAAAAAAAAbs/C4rCf4JvGws/s320/Pidato+Tentang+korupsi.jpg>)